


KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

17 Juli 2023

Bima - Dompu

Temuan BPK NTB di Pemkot Bima, Wajib Hukumnya Ditindaklanjuti!

Editor: Galih Mps  17 Juli 2023



MEGAH: Kantor Wali Kota Bima terlihat megah. Pembangunan sayap kantor wali kota ini pernah menjadi temuan BPK. (ISLAMUDDIN/LOMBOK POST)

KOTA BIMA-Wali Kota Bima Muhammad Lutfi telah memerintah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti temuan BPK NTB. "Harus dikembalikan dan ditindaklanjuti. Wajib hukumnya," tegas Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima H Mahfud kepada *Lombok Post*.

Terlebih lagi, kata dia, temuan BPK sudah menjadi atensi pimpinan. Karena itu, OPD harus melaksanakan rekomendasi BPK. "Kalau ada rekomendasi berupa pengembalian, maka harus dikembalikan," ujar dia.

Khusus temuan di Badan Kesbangpol Kota Bima tahun 2022 senilai Rp 594 juta, Mahfud menjelaskan, telah ditindaklanjuti. "Sudah dijalankan rekomendasi BPK. Dalam temuan itu, tidak ada pengembalian. Hanya perbaikan saja," jelasnya.

Dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kota Bima tahun 2022, penggunaan anggaran di Badan Kesbangpol Kota Bima diduga bermasalah. BPK menemukan adanya pemborosan anggaran untuk pembayaran honorarium Forkopimda dan tim pelaksana Rp 594.028.000.

Berdasarkan hasil pengujian dokumen pertanggungjawaban pembayaran atas honorarium Forkopimda, diketahui terdapat beberapa permasalahan. Seperti pembentukan dan penetapan Forkopimda belum sesuai ketentuan, pembayaran honorarium tim pendukung Forkopimda Rp 536.810.000 tidak memadai, dan pembayaran honorarium tim perumus Forkopimda Rp 57.218.000 tidak sesuai standar satuan harga regional.

BPK NTB menilai pembentukan dan penetapan Forkopimda belum sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, tim utama Forkopimda dan tim sekretariat diatur dalam PP 12 Tahun 2022. Sementara pembentukan tim pendukung dan tim perumus tidak diatur peraturan tersebut. Keberadaan tim pendukung dan tim perumus hanya diatur melalui SK Wali Kota Bima Nomor 188.45/337/300/2022.

Tim BPK Perwakilan NTB juga menilai pembayaran honorarium tim pendukung Forkopimda senilai Rp 536.810.000 tidak memadai. Hasil wawancara tim BPK NTB dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima menunjukkan tim pendukung dimasukkan sebagai salah satu bagian Forkopimda berdasarkan hasil konsultasi dengan Kesbangpol NTB. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dalam hal pembayaran honorariumnya.

Sementara, komposisi tim penerima honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepala daerah maupun Sekda terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Harga satuan tertinggi honorarium untuk sebulan, yakni pengarah Rp. 1,5 juta, penanggung jawab senilai Rp 1,250 juta, ketua Rp 1 juta, wakil ketua Rp 850 ribu, dan anggota Rp 750 ribu.

Atas temuan itu, BPK NTB merekomendasikan kepada Wali Kota Bima agar merevisi SK tim Forkopimda sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2022 dan menghentikan pembayaran honorarium kepada anggota yang tidak sesuai aturan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bima M Hasyim mengatakan, pada prinsipnya sepakat dengan temuan BPK tersebut dan akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. "Tetapi keberadaan tim pendukung dan tim perumus tersebut sangat menunjang aktivitas Forkopimda dalam penyiapan data dan instrumen lain dalam pengambilan keputusan," ucap dia, kemarin.

Meski demikian, Hasyim mengaku secara umum pihaknya tetap akan mengikuti saran temuan BPK tersebut. Kaitan rekomendasi BPK agar menghentikan pembayaran honor kepada tim pendukung dan tim perumus, Hasyim memastikan akan mematuinya. "Jika hal tersebut menjadi rekomendasi BPK, maka kami akan patuh terhadap temuan tersebut dan segera melakukan penyesuaian setelah kami konsultasikan dengan pimpinan daerah," pungkasnya. **(jlo/r8)**